PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk

LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT LCK GLOBAL KEDATON TBK LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halamar
Surat Penyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 47



SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL **TERSEBUT**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama

Lim Kah Hock

Alamat kantor :

PT LCK Global KedatonTbk

Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No 64. Jalan Letjen Suprapto Rt 009/ Rw 007

Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran. Jakarta Pusat 10640

Alamat Rumah: No. 6, Jalan Gopeng Off Jalan Pasar, 41400, Klang, Selangor, Malaysia

Telepon

(62 21) 7988962

Jabatan

Direktur Utama

Nama

Ruben Partogi

Alamat kantor :

PT LCK Global KedatonTbk

Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No 64. Jalan Letjen Suprapto Rt 009/ Rw 007

Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran. Jakarta Pusat 10640

Alamat

; Jl. Dr Saharjo Sawo II/27, Kel. Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,

Indonesia

Telepon

(62 21) 30066708

Jabatan

: Direktur

Menyatakan bahwa:

Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk;

2. Laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tok telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar:

 b. Laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT LCK Global KedatonTbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakil Jakarta, 28 Mei C2E24AJX172787206 Lim Kah Hock Ruben Partogi Direktur Utama Direktur



Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

Cyber 2 Tower 20th floor JI. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Jakarta 12950, Indonesia Main +62 (21) 2553 9200 Fax +62 (21) 2553 9298

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00706/2.1051/AU.1/03/1029-1/1/V/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KOSASIH NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Juninho Widjaja, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP. 1029

28 Mei 2021

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 DESEMBER 2020

Tanggal 31 DESEMBER 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ASET ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2d,2e,4,18	13.746.039.751	9.733.092.427
Piutang usaha	2e,5,18,19	68.387.874.539	71.708.762.294
Piutang lain-lain	2e,18	-	605.149.370
Uang muka proyek	6	47.339.289.061	44.470.360.281
Total Aset Lancar		129.473.203.351	126.517.364.372
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto	2f,2g,7,14	17.044.530.683	17.317.419.333
Aset pajak tangguhan	2h,8d	92.882.299	69.374.959
Total Aset Tidak Lancar		17.137.412.982	17.386.794.292
TOTAL ASET		146.610.616.333	143.904.158.664

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang lain-lain	2e,18	108.233.199	115.000.000
Utang pajak Pendapatan diterima di muka Utang pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh	2h,8a	12.048.669.156 -	13.463.737.439 267.300.000
tempo dalam waktu satu tahun	2e,18		64.982.535
Total Liabilitas Jangka Pendek		12.156.902.355	13.911.019.974
LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan kerja	2i,9,14	422.192.271	277.499.836
TOTAL LIABILITAS	,0,1.	12.579.094.626	14.188.519.810
EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham Modal dasar - 3.200.000.000 lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.000.000.000 lembar saham Tambahan modal disetor Saldo laba Belum ditentukan penggunaannya Telah ditentukan penggunaannya	10 11	100.000.000.000 19.005.644.508 14.629.303.431 396.573.768 134.031.521.707	100.000.000.000 19.005.644.508 10.413.420.578 296.573.768 129.715.638.854
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		146.610.616.333	143.904.158.664
TOTAL LIADILITAG DAN LIGHTAG			170.007.100.007

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN	2j,12,19	42.370.902.184	41.376.896.578
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2j,13,19	29.084.744.190	29.120.030.326
LABA KOTOR		13.286.157.994	12.256.866.252
Beban umum dan administrasi Pendapatan keuangan	2j,7,9,14	7.593.150.863 (394.958.048)	8.848.818.876
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		6.087.965.179	3.408.047.376
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan	2h,8b 8c 8d	(1.292.974.306) 22.931.961	(1.132.755.097) 20.316.741
Beban Pajak Penghasilan - Neto		(1.270.042.345)	(1.112.438.356)
LABA NETO TAHUN BERJALAN		4.817.922.834	2.295.609.020
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat pajak penghasilan terkait	9 2h,8d	(2.615.360) 575.379	(3.849.972) 962.493
Total rugi komprehensif lain - setelah pajak penghasilan terkait		(2.039.981)	(2.887.479)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		4.815.882.853	2.292.721.541
LABA PER SAHAM	21,15	4,82	2,30

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Telah Ditentukan Penggunaannya	Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Total Ekuitas
Saldo 1 Januari 2019		100.000.000.000	19.005.644.508	196.573.768	9.220.699.037	128.422.917.313
Pembentukan cadangan umum	10	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Dividen tunai	2n,10	-	-	-	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Total laba neto tahun berjalan		-	-	-	2.295.609.020	2.295.609.020
Penghasilan (beban) komprehensif lain: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat pajak penghasilan terkait	9 8d	<u>.</u>			(3.849.972) 962.493	(3.849.972) 962.493
Saldo 31 Desember 2019		100.000.000.000	19.005.644.508	296.573.768	10.413.420.578	129.715.638.854
Pembentukan cadangan umum	10	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Dividen tunai	2n,10	-	-	-	(500.000.000)	(500.000.000)
Total laba neto tahun berjalan		-	-	-	4.817.922.834	4.817.922.834
Penghasilan (beban) komprehensif lain: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat pajak penghasilan terkait	9 8d	- -	- -	- -	(2.615.360) 575.379	(2.615.360) 575.379
Saldo 31 Desember 2020		100.000.000.000	19.005.644.508	396.573.768	14.629.303.431	134.031.521.707

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk LAPORAN ARUS KAS

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		45.424.489.939	58.744.457.460
Pembayaran kas kepada: Pemasok		(31.953.672.971)	(66.202.411.430)
Karyawan		(1.378.185.138)	(1.411.978.500)
Pembayaran pajak penghasilan		(2.685.110.628)	(1.834.974.678)
Kegiatan operasional lainnya		870.408.657	(2.038.440.138)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan			
untuk) Aktivitas Operasi		10.277.929.859	(12.743.347.286)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	7	(5.700.000.000)	(3.303.809.366)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran dividen tunai	10	(500.000.000)	(1.000.000.000)
Pembayaran utang pembiayaan		(64.982.535)	(53.358.000)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(F64 092 F2F)	(4.052.259.000)
AKTIVITAS Peridanaan		(564.982.535)	(1.053.358.000)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		4.012.947.324	(17.100.514.652)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		9.733.092.427	26.833.607.079
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		13.746.039.751	9.733.092.427

Tanggal 31 Desember 2020 Serta
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Entitas Induk dan Informasi Umum

PT LCK Global Kedaton Tbk ("Perusahaan"), didirikan dengan nama PT Global Kedaton Teknologi, sesuai Akta Notaris Sahat Simanungkalit, S.H., M.Kn. No. 44 tanggal 31 Juli 2013, notaris di Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-45029.AH.01.01.2013 tanggal 27 Agustus 2013 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77, Tambahan No. 118363 tanggal 24 September 2013. Nama Perusahaan berubah menjadi PT LCK Global Kedaton berdasarkan Akta Notaris Rifson, S.H., M.Kn. No. 3 tanggal 19 Mei 2017. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011492.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. No. 50 tanggal 23 September 2020, notaris di Jakarta mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0066070.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77, Tambahan No. 036567 tahun 2020.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang:

- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi,
- Aktivitas telekomunikasi satelit, dan
- Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan beroperasi dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi yang mencakup pembangunan menara telekomunikasi.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan lokasi kantor administrasi di Graha Mampang lantai 5, Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan dan kantor operasional Perusahaan berlokasi di Ruko Perkantoran Cempaka Mas, Gedung LCK Group, Blok M, No. 64, Jalan Letnan Jendral Suprapto, RT 009 RW 007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2014.

Entitas Induk langsung Perusahaan adalah PT LCK Investama Prima Indonesia, sedangkan Entitas Induk utama Perusahaan adalah PT LCK Indo Holdings, dengan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Lim Chin Kim.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit, dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Chin Kim Komisaris : Kenny Lim Komisaris independen : Sungkana

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Lim Kah Hock Direktur : Ruben Partogi

Direktur Independen : Budiman Pramono Sidi

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

Manajemen kunci adalah Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Ruang lingkup Direktur Utama mencakup bidang hukum, pemasaran, dan operasional, dan ruang lingkup Direktur mencakup bidang sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, secara keseluruhan masing-masing sebesar Rp1.056.000.000 atau setara dengan 71,11% dan 74,79% dari total beban gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus.

Komite Audit

Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua : Sungkana

Anggota : Reinaldi Vivienda Anggota : Hendra Pramana

Internal Audit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Kepala Internal Audit Perusahaan adalah Reinaldi Vivienda.

Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing 11 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Penawaran Umum Saham

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-476/D.04/2017 untuk melakukan penawaran umum perdana saham biasa melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan pada harga penawaran Rp208 per saham. Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya pada BEI pada tanggal 16 Januari 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2018, seluruh saham Perusahaan sejumlah 1.000.000.000 saham telah dicatatkan pada BEI.

d. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Mei 2021. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi adalah yang bertanggung jawab atas kewajaran persiapan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan. Perusahaan telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

Amendemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan *waiver* atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- 1. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut; dan
- 2. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

 Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amendemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amendemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan PSAK 73, "Sewa" yang terkait dengan:

- perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- · akuntansi lindung nilai; dan
- · pengungkapan.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap Tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"

Amendemen ini mengklarifikasi pengurangan hasil neto penjualan setiap item yang dihasilkan saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan itensi manajemen dari biaya pengujian, serta mengklarifikasi arti dari "pengujian".

Amendemen PSAK 16 menambahkan paragraf 20 A yang mengatur bahwa entitas mengakui hasil penjualan dan biaya perolehan atas item yang dihasilkan dalam rugi laba serta mengukur biaya perolehan dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK 14: Persediaan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap Tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan" (lanjutan)

Amendemen PSAK 16 juga menambahkan paragraf 74 A yang mengatur pengungkapan jumlah biaya dan hasil perolehan aset tetap terkait paragraf 20A jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan pemindahan pengungkapan pada paragraf 74(d) ke dalam paragraf 74A(a).

Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap Tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amendemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19"

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat Amendemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Amendemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan)
 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
 - PSAK 73, "Sewa"

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Klasifikasi lancar/ jangka pendek dan tidak lancar/ jangka panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/ jangka pendek dan tidak lancar/ jangka panjang. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
- ii) untuk diperdagangkan; atau
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
- ii) untuk diperdagangkan;
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

d. Kas dan setara kas

Dalam laporan posisi keuangan, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatan dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Amendemen tersebut mengharuskan instrumen utang diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi instrumen utang, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FVTPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada tanggal 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2020.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan Perusahaan memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perusahaan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada FVTPL, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal, untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Dampak terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Perusahaan atas penerapan PSAK 71 secara restrospektif adalah sebagai berikut:

i) Pinjaman yang diberikan dan piutang, termasuk di dalamnya adalah kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain, diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("ECL") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perusahaan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Setelah penerapan PSAK 71, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks ketentuan untuk menilai ECL pada semua piutang usaha. Perusahaan telah menilai dan menyimpulkan bahwa ECL untuk piutang usaha yang jatuh tempo dari pihak ketiga, adalah tidak material, oleh karena itu, manajemen menyimpulkan tidak ada ECL yang disediakan.

Berdasarkan penilaian model bisnis Perusahaan pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020, kas dan bank, dan piutang usaha yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan memberikan kenaikan untuk arus kas yang sematamata mewakili pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan ini sekarang diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen utang dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan klasifikasi aset keuangan Perusahaan tidak mengakibatkan perubahan dalam pengukurannya.

Perusahaan belum menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran untuk liabilitas keuangan Perusahaan.

Penerapan PSAK 71 juga mengubah akuntansi Perusahaan untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi pada PSAK 55 dengan pendekatan kehilangan kredit ("ECL") berwawasan ke depan. PSAK 71 diterapkan secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tanpa penyajian kembali informasi komparatif tahun sebelumnya. Penerapan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Mulai tanggal 1 Januari 2020

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri atas utang lain-lain dan utang pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

i. Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri atas kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri atas utang lain-lain dan utang pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran

Mulai tanggal 1 Januari 2020

i. Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai solely payment of principal and interest (SPPI) testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran aset keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

a. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen keuangan)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang pihak berelasi.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan PKL hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai "Beban keuangan" pada laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

i. Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai, kecuali untuk aset-aset ini di mana perhitungan bunga tidak material.

Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban keuangan" dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (forward-looking) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 1 tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

(i) Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

(i) Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

f. Aset Tetap

Aset tetap, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Tahun

	Tanan
Bangunan	20 tahun
Peralatan	4 tahun
Kendaraan	4 tahun

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

g. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai rugi penurunan nilai.

Di dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

h. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Beban pajak final diakui dalam laba rugi, dan dinyatakan sebagai beban pajak final.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan laporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, kecali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Imbalan Kerja

Manfaat imbalan pasti

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika Amendemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- · Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan juran masa depan atas program.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" efektif mulai tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- 1.) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- 2.) Identifikasi kewajiban kinerja dalam kontrak;
- 3.) Tentukan harga transaksi:
- 4.) Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja dalam kontrak; dan
- 5.) Mengakui pendapatan ketika (atau saat) entitas memenuhi kewajiban kinerja.

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar ini yang diakui pada tanggal penerapan, yaitu tanggal 1 Januari 2020.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perusahaan mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

Pendapatan kontrak

Pendapatan kontrak atas jasa pembangunan penunjang telekomunikasi diakui saat dilakukannya penyerahan barang kepada pembeli yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kontrak liabilitas

Kontrak liabilitas diakui jika pembayaran diterima atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal) dari pelanggan sebelum Perusahaan mengalihkan barang atau jasa terkait. Kontrak liabilitas diakui sebagai pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kontrak tersebut (yaitu, mengalihkan kendali atas barang dan jasa terkait kepada pelanggan). Liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka" di laporan posisi keuangan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan dan beban kontrak

Pendapatan kontrak atas jasa pembangunan penunjang telekomunikasi diakui dengan metode persentase penyelesaian yang diukur dari tahap penyelesaian kontrak pada tanggal pelaporan.

Bila hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak diakui hanya sebesar biaya yang terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat dipulihkan. Biaya kontrak diakui sebagai beban dalam periode terjadinya.

Bila besar kemungkinan bahwa jumlah biaya kontrak konstruksi melebihi jumlah pendapatan kontrak, maka taksiran kerugian segera diakui sebagai beban. Biaya kontrak meliputi seluruh biaya material, tenaga kerja dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan kontrak.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

k. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. di mana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses.

I. Laba Per Saham

Jumlah laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diamati.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat *input* terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- 1. Tingkat 1 Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- 2. Tingkat 2 Teknik penilaian dimana tingkat *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3. Tingkat 3 Teknik penilaian dimana tingkat *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara tingkat dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan tingkat masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

n. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan.

o. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Standar, Amendemen/ Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian/ interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: Fitur Percepetan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan skompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"

Definisi yang baru menyatakan bahwa "Informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan tujuan umum yang dibuat berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu".

Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah saji informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Judul Laporan Keuangan"

Amandemen ini menambahkan kalimat "menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk" sebelum kalimat "...laporan keuangan itu sendiri" agar sesuai dengan intensi dari *IAS 1, "Presentation of Financial Statements"* paragraf 5.

Penerapan dari interpretasi dan penyesuaian-penyesuaian tahunan 2019 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kelangsungan Usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 (mulai tanggal 1 Januari 2020) dan PSAK 55 (sebelum tanggal 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2e dan 18.

Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil SPPI dan uji model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perusahaan atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi Ekspektasi Kerugian Kredit Piutang Usaha

Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probability of default adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi kondisi masa depan.

Manajemen telah melakukan perhitungan ECL dan manajemen berkeyakinan tidak perlu membentuk penyisihan penurunan nilai piutang karena seluruh piutang usaha belum mencapai *default* dan berhasil terealisasi pada tanggal jatuh temponya.

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut.

Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 7.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan di masa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Manajemen percaya bahwa tidak ada indikasi potensi penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2i dan 9.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2020	2019
Kas	17.378.374	303.525.162
Bank		
Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.971.145.454	4.963.305.015
PT Bank Mega Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	179.304.062 3.975.000	179.204.769
Total Bank	9.154.424.516	5.142.509.784
Deposito berjangka Rupiah		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.574.236.861	4.287.057.481
Total	13.746.039.751	9.733.092.427

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat bank dan setara kas dalam mata uang asing, yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

Tingkat bunga tahunan deposito berjangka per tahun sebesar 3%-5,25% pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang usaha atas jasa pengerjaan *Site Acquisition* (SITAC), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan *Civil Mechanical and Electrical* (CME) menara telekomunikasi.

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
PT Triview Geospatial Mandiri (Catatan 19)	45.947.915.446	31.847.061.489
PT Lasmana Swasti Prashida (Catatan 19)	20.297.839.310	38.923.964.393
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (Catatan 19)	1.967.165.623	-
Lain-lain ,	174.954.160	937.736.412
Total	68.387.874.539	71.708.762.294

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
1 - 90 hari	2.880.772.293	45.622.884.142
91 - 180 hari	36.068.312.590	18.146.227.607
Lebih dari 180 hari	29.438.789.656	7.939.650.545
Total	68.387.874.539	71.708.762.294

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh piutang usaha Perusahaan merupakan piutang dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang usaha masing-masing pelanggan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen Perusahaan berkeyakinan tidak perlu dibentuk provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha.

6. UANG MUKA PROYEK

Akun ini merupakan uang muka yang dibayarkan atas jasa pengerjaan proyek *SITAC* dan *CME* menara telekomunikasi, yang masih dalam pengerjaan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 nilai uang muka proyek masing-masing sebesar Rp47.339.289.061 dan Rp44.470.360.281.

7. ASET TETAP - NETO

Rincian aset tetap Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Bangunan	5.948.718.197	-	=	5.948.718.197
Peralatan	22.016.102.941	5.700.000.000	-	27.716.102.941
Kendaraan	314.900.000			314.900.000
Total Harga Perolehan	28.279.721.138	5.700.000.000	_ _	33.979.721.138
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	620.748.946	292.435.910	-	913.184.856
Peralatan	10.125.059.109	5.641.090.240	-	15.766.149.349
Kendaraan	216.493.750	39.362.500		255.856.250
Total Akumulasi Penyusutan	10.962.301.805	5.972.888.650		16.935.190.455
Nilai Buku	17.317.419.333			17.044.530.683
	31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Bangunan	4.852.168.097	1.096.550.100	-	5.948.718.197
Peralatan	19.808.843.675	2.207.259.266	-	22.016.102.941
Kendaraan	314.900.000			314.900.000
Total Harga Perolehan	24.975.911.772	3.303.809.366		28.279.721.138
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	381.071.583	239.677.363	-	620.748.946
Peralatan	5.106.011.455	5.019.047.654	-	10.125.059.109
Kendaraan	137.768.750	78.725.000		216.493.750
Total Akumulasi Penyusutan	5.624.851.788	5.337.450.017		10.962.301.805
Nilai Buku	19.351.059.984			17.317.419.333

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beban penyusutan dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp5.972.888.650 dan Rp5.337.450.017 (Catatan 14).

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, harga perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp126.386.130 dan Rp107.014.310.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kendaraan digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang diperoleh Perusahaan dari PT Astra Sedaya Finance.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mengasuransikan bangunan dan kendaraannya terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp4.050.000.000 dan Rp4.887.053.571.

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen Perusahaan berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

8. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Utang pajak terdiri dari:	2020	2019
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai	298.350 2.540.000 1.292.974.306 10.752.856.500	271.799 - 1.132.755.097 12.330.710.543
Total	12.048.669.156	13.463.737.439
Beban (manfaat) pajak penghasilan		
Beban (manfaat) pajak terdiri dari:	2020	2019

c. Pajak kini

Pajak kini

Pajak tangguhan

Total beban pajak penghasilan

b.

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1.292.974.306

1.270.042.345

(22.931.961)

1.132.755.097

1.112.438.356

(20.316.741)

	2020	2019
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan		
penghasilan komprehensif lain	6.087.965.179	3.408.047.376
Beda temporer: Imbalan kerja karyawan Beda permanen:	142.077.075	81.266.962
Perpajakan	-	1.320.703.349
Laba kena pajak	6.230.042.254	4.810.017.687

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak kini (lanjutan)

Perhitungan beban pajak dan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

934 -
372 -
- 69.749.325
- 1.063.005.772
1.132.755.097

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.087.965.179	3.408.047.376
Pajak dihitung pada tarif tertentu	1.263.487.879	802.592.274
Pengaruh pajak atas beda permanen Penyesuaian akibat perbedaan penggunaan	-	311.024.522
tarif pajak yang berlaku	(1.770.477)	(1.178.440)
Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak Pembulatan	8.324.996 (53)	-
Total beban pajak penghasilan	1.270.042.345	1.112.438.356

d. Pajak tangguhan

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

-			31 Desei		
_	Saldo Awal	Dikreditkan pada Laporan Laba Rugi	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tangguhan: Penyisihan imbalan kerja	69.374.959	31.256.957	(8.324.996)	575.379	92.882.299

Tanggal 31 Desember 2020 Serta

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Dikreditkan pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tangguhan:				
Penyisihan imbalan kerja	48.095.725	20.316.741	962.493	69.374.959

e. Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

9. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja dihitung sesuai dengan UU No. 13/2003 dan dengan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Efektif tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan harus menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) (Catatan 22).

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 3 Februari 2021 untuk tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 6 Maret 2020 untuk tanggal 31 Desember 2019 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja", menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat diskonto	6,99%	7,89%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	5,00%	5,00%
Usia pensiun	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat mortalitas	TMI-IV (2019)	TMI-III (2011)

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan tetap yang berhak atas imbalan kerja tersebut masing0masing sebanyak 11 karyawan.

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri atas:

2020	2019
422.192.271	277.499.836
n sebagai berikut:	
2020	2019
81.088.004	64.818.224
21.894.737	16.448.738
39.094.334	-
142.077.075	81.266.962
	422.192.271 n sebagai berikut: 2020 81.088.004 21.894.737 39.094.334

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.615.360	3.849.972
1		

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	277.499.836	192.382.902
Beban tahun berjalan (Catatan 14)	142.077.075	81.266.962
Beban komprehensif lain	2.615.360	3.849.972
Saldo akhir tahun	422.192.271	277.499.836

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp29.291.655, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih tinggi sebesar Rp33.044.074.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Manajemen Perusahaan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Di atas 5 tahun 422.192.271

Durasi rata-rata kewajiban manfaat pasti di akhir periode laporan adalah 18,45 tahun.

10. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan presentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Total
PT LCK Investama Prima Indonesia	625.220.200	62,52%	62.522.020.000
PT Maju Mekar Makmur	201.538.300	20,15%	20.153.830.000
Masyarakat	173.241.500	17,33%	17.324.150.000
Total	1.000.000.000	100,00%	100.000.000.000

2019

Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Total
PT LCK Investama Prima Indonesia	624.365.000	62,44%	62.436.500.000
PT Maju Mekar Makmur	201.000.000	20,10%	20.100.000.000
Masyarakat	174.635.000	17,46%	17.463.500.000
Total	1.000.000.000	100,00%	100.000.000.000

<u>Dividen Tunai dan Pembentukan Cadangan Umum</u>

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2020 dan telah dinyatakan dengan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., No. 44 pada tanggal yang sama, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk tambahan cadangan umum sebesar Rp100.000.000 dan melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp500.000.000 atas hasil operasi Perusahaan untuk tahun 2019 yang telah dilunasi pada tanggal 17 September 2020.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 19 Juni 2019 dan telah dinyatakan dengan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., No. 48 pada tanggal yang sama, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk tambahan cadangan umum sebesar Rp100.000.000 dan melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp1.000.000.000 atas hasil operasi Perusahaan untuk tahun 2018 yang telah dilunasi pada tanggal 16 Juli 2019.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, akun ini merupakan agio saham yang berasal dari penawaran umum perdana saham pada tahun 2018, setelah dikurangi dengan beban emisi sebesar Rp2.594.355.492.

12. PENDAPATAN

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa pengerjaan *SITAC* dan *CME* menara telekomunikasi, yang terdiri dari:

	2020	2019
SITAC dan CME	42.370.902.184	41.376.896.578

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada transaksi penjualan kepada pihak berelasi.

Rincian pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari total pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
PT Triview Geospatial Mandiri (Catatan 19)	40.403.736.561	26.035.582.604
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (Catatan 19)	1.967.165.623	9.713.386.589
Total	42.370.902.184	35.748.969.193

13. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Subkontraktor	29.084.744.190	29.120.030.326

Pemasok dengan nilai transaksi lebih dari 10% adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Erwin Sujana (Catatan 19)	27.723.615.592	16.426.759.000
Suhadi (Catatan 19)	1.361.128.598	6.537.965.328
Rizal (Catatan 19)	<u></u>	6.155.305.998
Total	29.084.744.190	29.120.030.326

14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Penyusutan (Catatan 7)	5.972.888.650	5.337.450.017
Gaji, THR dan bonus	1.378.185.138	1.411.978.500
Imbalan kerja karyawan (Catatan 9)	142.077.075	81.266.962
Honorarium tenaga ahli	100.000.000	253.859.200
Perpajakan	-	1.320.703.349
Lain-lain	_	443.560.848
Total	7.593.150.863	8.848.818.876

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. LABA PER SAHAM

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar pada tahun bersangkutan, sebagai berikut:

	Jumlah Rata-rata Laba Neto Tahun Tertimbang Saham yang Nilai Laba Berjalan Beredar per Saham		
2020	4.817.922.834	1.000.000.000	4,82
2019	2.295.609.020	1.000.000.000	2.30

16. INFORMASI SEGMEN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Perusahaan:

- -			
_	SITAC & CME	Addwork	Total
Pendapatan	42.370.902.184	-	42.370.902.184
Beban pokok pendapatan	29.084.744.190	-	29.084.744.190
Laba kotor	13.286.157.994	-	13.286.157.994
Beban umum dan administrasi	7.593.150.863	-	7.593.150.863
Pendapatan keuangan	(394.958.048)	-	(394.958.048)
Laba sebelum beban pajak penghasilan - neto	6.087.965.179	<u>.</u>	6.087.965.179
Beban pajak penghasilan - neto	(1.270.042.345)		(1.270.042.345)
Laba neto tahun berjalan	4.817.922.834	-	4.817.922.834
Beban komprehensif lain	(2.039.981)	-	(2.039.981)
Laba komprehensif periode berjalan	4.815.882.853		4.815.882.853
Aset segmen	146.610.616.333	-	146.610.616.333
Liabilitas segmen	12.579.094.626	-	12.579.094.626

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

- -			
	SITAC & CME	Addwork	Total
Pendapatan	41.376.896.578	-	41.376.896.578
Beban pokok pendapatan	29.120.030.326	-	29.120.030.326
Laba kotor	12.256.866.252	-	12.256.866.252
Beban umum dan administrasi	8.848.818.876	-	8.848.818.876
Laba sebelum beban pajak penghasilan - neto	3.408.047.376	- -	3.408.047.376
Beban pajak penghasilan - neto	(1.112.438.356)		(1.112.438.356)
Laba neto tahun berjalan	2.295.609.020	-	2.295.609.020
Beban komprehensif lain	(2.887.479)	<u>-</u>	(2.887.479)
Laba komprehensif periode berjalan	2.292.721.541	_	2.292.721.541
Aset segmen	143.809.713.545	94.445.119	143.904.158.664
Liabilitas segmen	14.184.651.336	3.868.474	14.188.519.810

17. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu risiko tingkat suku bunga), dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan pengelolaan modal.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk bank dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Risiko kredit timbul dari simpanan-simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas pada institusi keuangan yang terpercaya.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Perusahaan pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan operasi utama.

		20	20	
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Total
Bank dan setara kas	13.728.661.377	-	-	13.728.661.377
Piutang usaha	38.949.084.883	29.438.789.656	<u> </u>	68.387.874.539
Total	52.677.746.260	29.438.789.656	<u>-</u>	82.116.535.916
	2019			
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Total
Bank dan setara kas	9.429.567.265	-	-	9.429.567.265
Piutang usaha	63.769.111.750	7.939.650.544	-	71.708.762.294
Piutang lain-lain	605.149.370			605.149.370
Total	73.803.828.385	7.939.650.544	-	81.743.478.929

Risiko Pasar

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada utang pembiayaan.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko tingkat suku bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

				2020			
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun Kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun Ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun Keempat	Jatuh Tempo Lebih dari Tahun Kelima	Total
Aset Keuangan Bank dan setara kas	3%- 5,25%	13.728.661.377		-			13.728.661.377
				2019			
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun Kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun Ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun Keempat	Jatuh Tempo Lebih dari Tahun Kelima	Total
Aset Keuangan Bank dan setara kas Liabilitas Keuangan	3%-5,25%	9.429.567.265	-	-	-	-	9.429.567.265
Utang pembiayaan Neto	11,96%	9.364.584.730					9.364.584.730

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko pada saat Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pendapatan dari pelanggan.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

		2020)	
	Di bawah 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Liabilitas Keuangan Utang lain-lain	108.233.199	_	_	108.233.199
Total	108.233.199			108.233.199
		2019	9	
	Di bawah 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Liabilitas Keuangan	Di bawan i tanan	<u> </u>	o tanan	Total
Utang lain-lain	115.000.000	-	-	115.000.000
Utang pembiayaan jangka panjang	39.885.483	25.097.052	<u> </u>	64.982.535
Total	154.885.483	25.097.052	-	179.982.535

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Tabel di bawah ini merangkum total modal yang dipertimbangkan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Modal saham	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	19.005.644.508	19.005.644.508
Saldo laba	15.025.877.199	10.709.994.346
Total	134.031.521.707	129.715.638.854

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara liabilitas neto dengan modal. Liabilitas neto adalah total liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan total kas dan setara kas, sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Total liabilitas	12.579.094.626	14.188.519.810
Dikurangi kas dan setara kas	13.746.039.751	9.733.092.427
Liabilitas neto	(1.166.945.125)	4.455.427.383
Total ekuitas	134.031.521.707	129.715.638.854
Rasio utang terhadap modal	(0,009)	0,034

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

	2020	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN Aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	13.746.039.751	13.746.039.751
Piutang usaha	68.387.874.539	68.387.874.539
Total Aset Keuangan	82.133.914.290	82.133.914.290
LIABILITAS KEUANGAN Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi Utang lain-lain	108.233.199	108.233.199
Otally lain-lain	100.233.199	100.233.199
Total Liabilitas Keuangan	108.233.199	108.233.199
	•	

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	2019	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN Pinjaman dan piutang	0.722.002.407	0.722.002.427
Kas dan setara kas	9.733.092.427 71.708.762.294	9.733.092.427 71.708.762.294
Piutang usaha Piutang lain-lain	605.149.370	605.149.370
Total Aset Keuangan	82.047.004.091	82.047.004.091
<u>LIABILITAS KEUANGAN</u> Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi		
Utang lain-lain	115.000.000	115.000.000
Utang pembiayaan	64.982.535	64.982.535
Total Liabilitas Keuangan	179.982.535	179.982.535

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

- 1. Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan utang lain-lain mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
- 2. Nilai wajar utang pembiayaan ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

19. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

PELANGGAN

PT Triview Geospatial Mandiri (Catatan 5 dan 12)

Sesuai dengan perjanjian kerjasama No.39/PIK-CME/TGM-GKT/XII-2018 tanggal 18 Desember 2018, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Triview Geospatial Mandiri untuk pengerjaan *Construction, Mechanical and Electrical* pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2019.

Sesuai dengan perjanjian kerjasama No. 038/PIK-CME/TGM-GKT/I-2020 tanggal 8 Januari 2020, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Triview Geospatial Mandiri untuk pengerjaan *Construction, Mechanical and Electrical* pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 8 Januari 2021 dan diperpanjang sampai tanggal 5 Januari 2022 (Catatan 22).

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

PELANGGAN (lanjutan)

PT Lasmana Swasti Prashida (Catatan 5 dan 12)

Sesuai dengan perjanjian kerjasama No.056/Proc-CME/KP/LSP-LCKGK/FEB/18 tanggal 8 Februari 2018, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Lasmana Swasti Prashida untuk pengerjaan konstruksi sarana penunjang base transceiver station sipil, mekanikal dan elektrikal. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 8 Februari 2019 dan diperpanjang pada tanggal 4 Februari 2019 dengan perjanjian kerjasama No.018/Proc-CME/KP/LSP-LCKGK/FEB/19, sehingga perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 4 Februari 2020.

Sesuai dengan perjanjian kerjasama No.011/Proc-CME/LSP-LCKGK/Feb/20 tanggal 5 Februari 2020, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Lasmana Swasti Prashida untuk pengerjaan yang meliputi Detail-Design, Pekerjaan Persiapan, Pembangunan Pondasi, Konstruksi, Transportasi Material Tower, Ereksi, Instalasi ME & Grounding, Penyelesaian, Pengajuan Teknis, Penyambung / Instalasi PLP serta pekerjaan lainnya. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 5 Februari 2021 dan diperpanjang sampai tanggal 8 Februari 2022 (Catatan 22).

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (Catatan 5 dan 12)

Sesuai dengan perjanjian kerjasama No.056/IBS-LGK/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk untuk pengerjaan konstruksi sarana penunjan *base transceiver station* sipil, mekanikal dan elektrikal. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 10 Oktober 2024.

SUBKONTRAKTOR

Subkontraktor - Bapak Erwin Sujana (Catatan 13)

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja No.003/LCKGK-ERWIN SUJANA/PKS-SUBCON/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, Perusahaan dan Bapak Erwin Sujana selaku subkontraktor setuju untuk memperpanjang perjanjian ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 atau dapat disesuaikan dengan masa kerja proyek yang telah diperoleh dan selanjutnya akan dikaji ulang dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun. Kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja No.03/LCKM-ERWIN SUJANA/PKKK-SUB CON/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, Perusahaan dan Bapak Erwin Sujana selaku subkontraktor setuju untuk memperpanjang perjanjian ini sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 atau dapat disesuaikan dengan masa kerja proyek yang telah diperoleh dan selanjutnya akan dikaji ulang dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun. Perjanjian ini diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2021 (Catatan 22).

Subkontraktor - Bapak Suhadi (Catatan 13)

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja No.006/LCKM-SUHADI/PKS-SUBCON/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Perusahaan dan Bapak Suhadi selaku subkontraktor menyetujui perjanjian ini sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 atau dapat disesuaikan dengan masa kerja proyek yang telah diperoleh dan selanjutnya akan dikaji ulang dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja No.008/LCKM-SUHADI/X/PKS-SUBCON/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perusahaan dan Bapak Suhadi selaku subkontraktor setuju untuk memperpanjang perjanjian ini sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 atau dapat disesuaikan dengan masa kerja proyek yang telah diperoleh dan selanjutnya akan dikaji ulang dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

SUBKONTRAKTOR (lanjutan)

Subkontraktor - Bapak Rizal (Catatan 13)

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja No.002/LCKGK-RIZAL/PKS-SUBCON/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, Perusahaan dan Bapak Rizal selaku subkontraktor setuju untuk memperpanjang perjanjian ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 atau dapat disesuaikan dengan masa kerja proyek yang telah diperoleh dan selanjutnya akan dikaji ulang dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun. Kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang perjanjian ini sampai dengan tanggal 23 Desember 2019. Berdasarkan perjanjian kontrak kerja No.008/LCKM-RIZAL/XII/PKS-SUBCON/2019 tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan dan Bapak Rizal selaku subkontraktor setuju untuk memperpanjang perjanjian ini sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 atau dapat disesuaikan dengan masa kerja proyek yang telah diperoleh dan selanjutnya akan dikaji ulang dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun. Perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan Bapak Rizal berakhir pada tanggal 23 Desember 2020.

20. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

Rekonsiliasi utang pembiayaan konsumen neto:

	Utang pembiayaan konsumen
Utang pembiayaan neto pada 1 Januari 2020	64.982.535
Arus kas neto	(64.982.535)
Utang pembiayaan neto pada 31 Desember 2020	-

114 ----

21. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor- faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Berdasarkan penilaian manajemen, peristiwa yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan ini.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengumumkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata, guna memenuhi kehidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pegawai tidak tetap), *outsourcing*, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi tunjangan minimum yang harus dibayarkan kepada pegawai.

Perusahaan masih menilai dampak penerapan PP 35/2021 terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Ikatan dan Perjanjian Penting

PELANGGAN

PT Triview Geospatial Mandiri

Sesuai dengan perjanjian Kerjasama No. 053/PIK-CME/TGM-LGK/I-2021 tanggal 5 Januari 2021, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Triview Geospatial Mandiri untuk pengerjaan *Construction, Mechanical and Electrical* pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2022 (Catatan 19).

PT Lasmana Swasti Prashida

Sesuai dengan perjanjian kerjasama No. 05/Proc-CME/KP/LSP-LCKGK/Feb/2021 tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Lasmana Swasti Prashida untuk pengerjaan yang meliputi Detail-Design, Pekerjaan Persiapan, Pembangunan Pondasi, Konstruksi, Transportasi Material Tower, Ereksi, Instalasi ME & Grounding, Penyelesaian, Pengajuan Teknis, Penyambung / Instalasi PLP serta pekerjaan lainnya. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 8 Februari 2022 (Catatan 19).

SUBKONTRAKTOR

Subkontraktor - Bapak Erwin Sujana

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja No.01/LCKM-ERWIN SUJANA/PKKK-SUB CON/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan dan Bapak Erwin Sujana selaku subkontraktor setuju untuk memperpanjang perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau dapat disesuaikan dengan masa kerja proyek yang telah diperoleh dan selanjutnya akan dikaji ulang dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun (Catatan 19).